

BAB II

PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian terdahulu merupakan sebuah penelitian dilakukan oleh peneliti itu sendiri dan nantinya dapat memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Penyajian penelitian terdahulu yang diuraikan di dalam pembahasan ini dapat memberikan tambahan referensi terhadap penelitian yang akan dilaksanakan.

Hasil penelitian dari Siti Amila (2023), pada penelitiannya dimana berjudul **“Analisis Dampak Dan Resiko Pemindahan Ibu Kota Negara Terhadap Ekonomi Di Indonesia”** menjelaskan bahwa adanya pemindahan ibu kota merupakan topik yang diciptakan sejak masa Presiden Sukarno, yang dimana memilih melakukan pemindahan ibu kota di Kalimantan Tengah tepatnya di Palangkaraya. Presiden Sukarno sendiri tanpa sebab memilih daerah tersebut dikarenakan daerah tersebut merupakan wilayah tengah-tengah dan menghindari pemusatan pada daerah Jawa. Pada uraian tersebut menjelaskan perpindahan pusat ibu kota telah di contohkan oleh negara lain, yaitu Australia dan Brazil dalam perjalanannya adanya proses perpindahan pusat ibu kota diharapkan dapat mengurangi dari segi ketimpangan dan nantinya menciptakan pertumbuhan pada ekonomi di wilayah yang baru nantinya. Presiden Joko Widodo menetapkan perpindahan ibu kota berada di wilayah Kalimantan Timur, yang bertempat di Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara (KUKAR). Tujuan utama dalam proses perpindahan ini ialah meratakan dari segi perekonomian di Indonesia, mengurangi ketimpangan dari Pulau Jawa sendiri dengan wilayah lain, serta mengurangi berbagai masalah yang ada di Jakarta. Adanya perpindahan ibu kota negara baru memiliki harapan dimana nantinya bisa lebih mendorong dari segi pertumbuhan ekonomi khususnya daerah timur Indonesia dan mengurangi pemusatan atau kesenjangan ketimpangan ekonomi yang cukup terlihat. Gambaran menunjukkan perpindahan pusat ibu kota sendiri dapat memberikan dampak meningkatkan segi perekonomian sebesar 0,1-0,2% dengan melalui

dorongan investasi baru yang masuk nantinya. Data yang terurai menjelaskan ketimpangan pada sektor ekonomi yang terlihat, pada Pulau Jawa sendiri memberikan 59% dari kontribusinya pada ekonomi ditingkat nasional, pada Pulau Kalimantan sendiri hanya memberikan 8%. Latar belakang dari beberapa negara lain menjelaskan perpindahan pusat ibu kota dapat lebih memberi rangsangan tersendiri pada pertumbuhan ekonomi nantinya dan menurunkan angka pada sisi ketimpangan regional apabila di rancangan dengan tepat dan tersusun matang. Pada proses pemindahan ini ialah sebuah kebijakan yang terbilang strategis ddalam hal ini, memiliki tujuan untuk lebih pemeratakan ekonomi pada tingkat nasional dan mengurangi masalah yang ada seperti kesenjangan wilayah dan kepadatan menjadi ancaman tersendiri.

Dalam penelitian dari Najilatil Mazda (2022), pada penelitiannya dimana berjudul **“Analisis Dampak Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Terhadap Social Security”** menjelaskan bahwa adanya perpindahan ibu kota ialah langkah yang bijak strategis yang dimana telah dijalankan oleh banyak negara untuk menekan adanya masalah dari segi ekonomi, sosial, dan politik. Di banyak negara, perpindahan ibu kota dijalankan karena adanya alasan tersendiri, seperti konsentrasi pada titik kepadatan segi penduduk yang tinggi. Didalam pembahasan Indonesia, perpindahan ibu kota yang sebelumnya dari DKI Jakarta dan nantinya dipindahkan di wilayah Kalimantan Timur dipertimbangkan sebagai solusi tersendiri untuk menekan kepadatan pada penduduk yang terbilang besar khususnya di Pulau Jawa, serta berbagai masalah yang timbul seperti lingkungan, polusi, kemacetan. Dalam hal ini, proses pemindahan pada ibu kota negara baru tidak terlepas adanya timbul yang nantinya, seperti dampak demografis, ekonomi, dan sosial nantinya yang timbul. Hal tersebut, dapat mengamankan pada pemusatan ekonomi dan perpolitikan yang baru, kesenjangan, lalu masalah sosial semacam akulturasi dalam hal budaya maupun lainnya yang memungkinkan dapat terjadi nantinya. Nantinya, kajian tersebut harus memperhatikan dan melihat berbagai aspek yang ada bertujuan memastikan proses pengelolaan yang benar efektif dan memiliki hasil dampak yang baik bagi khususnya masyarakat sekitar.

Dalam penelitian dari Faturahman (2024), pada penelitiannya dimana berjudul **“Dampak Positif dan Negatif Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN)”** Menjelaskan bahwa adanya objek perpindahan ibu kota memiliki tujuan mengurangi kesan yang timbul karena Jawa sentris dan lebih mengedepankan berbagai unggulan yang ada di wilayah daerah Indonesia Timur. Pada pelaksanaannya, menimbulkan berbagai kekhawatiran karena pelaksanaan proyek ibu kota negara yang baru nantinya, dengan dampak seperti negatif yang timbul terhadap lingkungan, potensi timbulnya konflik sosial, dan masalah seperti pendanaan. Deforestasi yang dilakukan secara besar dan menyeluruh nantinya dapat mengancam kerusakan pada ekosistem khususnya hutan di wilayah Kalimantan Timur, mengganggu dan mengancam berbagai hal. Ditambah, adanya perbedaan mulai dari budaya ASN yang nantinya dipindahkan ke wilayah tersebut, khususnya masyarakat lokal suku daerah tersebut. Dari kacamata proses pendanaan wilayah tersebut sangatlah membutuhkan cukup banyak pembiayaan yang diantara lain pembiayaan tersebut tidak berasal dari APBN saja, hal itu sangatlah riskan karena akan menyebabkan penambahan dari segi hutang Indonesia sendiri dan segi ketepatan untuk penanganan proyek yang tepat pada waktunya. Pada penelitian ini juga membagikan kurangnya kritik kepada proses gambaran alur pendanaan yang akan dipergunakan dan lebih menekankan kepada kegagalan proyek nantinya yang akan berdampak dapat merugikan berbagai hal seperti segi alam dan keuangan yang ada di negara.

Dalam penelitian dari Aulia Safira Putri (2024), pada penelitiannya dimana berjudul **“Analisis Dampak Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) Terhadap Potensi Pertumbuhan Investasi Domestik Dan Asing”** Menjelaskan bahwa adanya dampak tersendiri dari adanya Ibu Kota Baru di wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang dimana dipandang dari segi ekonomi, khususnya dari kacamata investasi yang nantinya masuk. Demikian pula, adanya penempatan Ibu Kota baru ini akan menambah pesona daya tarik yang di tujukan untuk para investor lokal maupun luar lokal atau asing, akan tetapi tidak berdampak secara signifikan, khususnya di sektor unggulan seperti tambang, dimana yang nampak

dari kurangnya atau rendahnya reaksi pasar modal sendiri pada adanya perpindahan ibu kota yang dilaksanakan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Disisi lain pihak pemerintah sendiri telah menganggarkan untuk pembangunan IKN sebesar 19,2% dari total keseluruhan anggaran yang disusun sebesar Rp 466 triliun yang di alokasikan melalui APBN, dan nantinya sisa kekurangan tersebut didapatkan dari investasi yang masuk pada proses perjalanannya. Dalam hal ini, memastikan terkait kelancaran dalam tahap pembangunan ibu kota ini, dari pihak pemerintah sendiri sebagai pelaksana mendorong berbagai lini sektor investor yang tujuannya untuk ikut andil dalam pembangunan, mereka para investor sendiri yang akan masuk pada proses tahap pembangunan ibu kota negara baru ini akan melalui beberapa tahap seleksi yang nantinya bertujuan untuk menjamin kualitas dan mutu yang ada agar terjamin untuk jangka panjangnya. Akan tetapi, beberapa investor sendiri merasa kurang enggan khususnya dari manca negara karena resiko gambaran kedepan terkait perekonomian kedepannya bagaimana karena proses pembangunan sendiri belum mencapai titik final atau selesai. Meskipun hadirnya seperti sisi keringanan seperti golden visa dan berbagai keringanan dari sisi perpajakan namun para investor sendiri enggan dan menarik diri dari proyek yang dilaksanakan oleh pemerintah sendiri. Pada penelitian ini memiliki gambaran untuk memaparkan dan memberikan ungkapan fakta yang terjadi terkait perkembangan yang ada dan pertumbuhan investasi pada lini lokal dan asing dalam gambaran pembangunan ibu kota baru ini, dimana juga lebih mengkaji bagaimana gambaran kedepan keberadaan ibu kota baru ini yang nantinya apakah bisa menjadi pelopor pada lini pertumbuhan ekonomi nasional pada masa yang akan datang.

Dalam Penelitian dari Sriyono (2024), pada penelitiannya dimana berjudul **“Dampak Pengambilan Keputusan Pemerintah Terkait Pemindahan Ibu Kota Negara Dalam Aspek Geografi, Sosial, Politik, Dan Ekonomi”** Menjelaskan bahwa adanya sebuah keputusan yang diambil terkait perpindahan ibu kota negara di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Dimana secara gambaran geografis sangatlah diuntungkan karena terletak di wilayah strategis dan memiliki

iklim yang menunjang untuk keberlangsungan masyarakat. Dimana, untuk mengatasi menekan pada tingkat kesenjangan diantara Pulau Jawa dan daerah lain, pihak pemerintah sendiri berharap adanya perubahan dan nantinya dapat berdampak kepada pemerataan dalam berbagai hal seperti perekonomian, pembangunan, menekan berbagai resiko bencana dan mengurangi ketergantungan pada pasokan barang dari Pulau Jawa sendiri. Pada perjalanannya, Provinsi Kalimantan Timur sendiri ditetapkan sebagai tempat pembangunan ibu kota baru nantinya karena dianggap lokasi daerah tersebut sangatlah strategis dan cukup relatif aman dari bencana alam, terutama dari guncangan bencana gempa bumi yang sering melanda Pulau Jawa. Akan tetapi, proses perpindahan ibu kota ini pula juga menimbulkan berbagai hambatan tantangan, seperti kesiapan kesiapan dalam lini pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut dan resiko memungkinkan timbulnya anggaran dari pemerintah apabila nantinya proyek pembangunan ini terbilang belum berhasil dan berdampak signifikan. Didalam gambaran sosial-politik, perpindahan ibu kota ini diharapkan nantinya dalam segi pembangunan akan lebih bisa merata dan tidak berfokus kepada Pulau Jawa. Didalam jurnal ini juga lebih menonjolkan pentingnya dalam segi pengambilan atau penentuan kebijakan keputusan yang tepat dalam proses perpindahan ibu kota dari DKI Jakarta menuju Provinsi Kalimantan timur, memandang dampak kedepan pembangunan tersebut sangatlah luas dari segi manapun seperti geografi, sosial, perpolitikan dan perekonomian mendatang. Perpindahan ini dapat dipandang sebagai langkah-langkah yang terbilang strategis dimana dalam mewujudkan pusat pemerintahan lebih tertata efisien dan merata dalam berbagai aspeknya.

Dalam penelitian dari Arfani (2023), pada penelitiannya dimana yang berjudul **“Dampak Pemindahan Ibu Kota Negara Baru terhadap Ekonomi dan Sosial Di Provinsi Kalimantan Timur”** Menjelaskan bahwa adanya perpindahan ibu kota baru nantinya yang mana memiliki tujuan untuk menekan angka pada kesenjangan di lini sektor ekonomi dan sosial dan lini kependudukan yang dimana kurun waktu ini terpusatkan pada Pulau Jawa. Poin awal dalam

proses pemindahan ini ialah untuk menekan pada kemacetan, tingkat polusi pada udara, dan kualitas udara yang ada. Demikian juga adanya pembangunan ini membawa manfaat yang cukup baik bagi tingkat ekonomi dan sosial, pemindahan ini pula membawa tantangan tersendiri dalam konteks perpolitikan, ekonomi, sosial. Pada ciri ekonomi sendiri menekankan adanya pemindahan ini akan membawa dan mendorong peningkatan pada lini ekonomi di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Demikian pada dampak ekonomi, pada perubahan sosial ini tidak bisa diabaikan semata. Perpindahan ibu kota negara menuju Provinsi Kalimantan Timur menumbuhkan dinamika sosial baru. Gambaran geografis, lokasi penempatan perpindahan ibu kota ini dipilih karena letak penempatannya cukup strategis aman dari bencana alam yang melanda seperti, gempa, erupsi gunung berapi yang sering melanda pada Pulau Jawa.

Dalam penelitian dari Jundi (2023), pada penelitiannya dimana berjudul **"Analisa Pemindahan Ibu Kota Negara Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara"** Menjelaskan bahwa adanya gambaran rencana perpindahan ibu kota negara yang dimana disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, yang dimana rencana tersebut menuai berbagai kritik tanggapan dari berbagai kalangan baik berupa dukungan bagi berjalannya rencana tersebut dan penolakan adanya pemindahan tersebut. Rancangan undang-undang ibu kota negara sendiri disahkan pada 18 Januari 2022. Pada penelitian ini pula diungkapkan bahwasannya nantinya adanya penelitian ini bermaksud bertujuan untuk mengetahui analisa sosiologis, filosofis dan yuridis terkait adanya UU IKN.

Dalam penelitian dari Irwansyah (2024), pada penelitiannya yang dimana berjudul **"Dampak Pemindahan Ibu Kota Ke Kalimantan Timur: Perspektif Democracy Civil Society"** Menjelaskan bahwa adanya analisis terkait pemindahan Ibu kota negara yang akan dipindahkan di wilayah Kalimantan Timur dengan menggunakan perspektif demokrasi civil society. Fokus dari penelitian ini pada daerah Kukar, Penajam Paser Utara, dan Kota Balikpapan dimana daerah-

daerah tersebut secara langsung berbatasan langsung dengan wilayah Otorita Ibu Kota Nusantara. Adanya pemindahan Ibu Kota Negara pada wilayah Kalimantan Timur dari penelitian tersebut menunjukkan potensi pemindahan tersebut dapat memperkuat demokrasi civil society. Dimana dapat dilihat dari partisipasi masyarakat dalam segala perjalanannya mulai dari pengambilan kebijakan, penguatan disisi tubuh organisasi masyarakat lokal disana dan menciptakan ruang publik umum yang kian terbuka bagi masyarakat.

Dalam penelitian dari Siti Aisa (2020), pada penelitiannya yang dimana berjudul **"Dampak Dan Resiko Perpindahan Ibu Kota Terhadap Ekonomi Di Indonesia"** Menjelaskan bahwa adanya pemindahan ibu kota negara memiliki resiko yang besar, dalam perjalanannya harus direncanakan ditata dengan matang. Karena faktor beban DKI Jakarta yang lama kelamaan sudah terasa tidak mampu menampung, maka pada akhirnya seluruh pusat pemerintahan nantinya akan bergeser dipindahan di wilayah yang telah ditentukan untuk pembangunan pusat ibu kota negara yang baru. Adanya hal tersebut dalam penelitian ini menganalisis dampak yang ada mulai dari ekonomi yang terlihat nyata, dan adanya pemindahan tersebut beresiko yang nantinya dapat diantisipasi oleh pemerintah sendiri. Pada aspek ekonomi sendiri adanya peningkatan dari nilai Produk Domestik Bruto. Namun dari peningkatan itu pula kita juga perlu mengantisipasi resiko karena pembangunan ibu kota negara ini memerlukan pembiayaan yang besar bersumber dari dana APBN, BUMN, Badan Usaha, dan pihak bagian swasta yang mendukung proyek pemerintah ini.

Dalam Penelitian dari Delvi Aprillia (2024) dalam penelitiannya yang berjudul **"Dampak dan resiko Pemindahan Ibu Kota Terhadap Perekonomian Di Indonesia"** Menjelaskan bahwa adanya sebuah resiko dari perkembangan infrastruktur yang dikerjakan di IKN. Resiko terbesar ialah terkait dengan adanya infrastruktur diarea utama. Dari segi pemerintah yang hanya mendapatkan sejumlah 19,2% dari total keseluruhan anggaran sebesar Rp 466 triliun yang didapatkan dari APBN, nanti adanya potensi dari kekayaan negara

yang akan gagal berkembang akibat pengembang swasta gagal. Maka dari hal itu, penelitian ini memfokuskan untuk menyelidiki dari sebuah dampak ekonomi dan manajemen resiko selama pengembangan relokasi Ibu Kota Negara sendiri.

Dalam penelitian ini tentu berbeda dengan hasil penelitian terdahulu diatas dimana peneliti berusaha untuk menggabungkan dari unsur Ekonomi, pembangunan, regulasi tentang Ibu Kota Negara yang nantinya dapat menjadi pembahasan pembaharu terkait dampak pembangunan Ibu Kota Nusantara terhadap pembangunan kabupaten/kota di wilayah sekitar. Nantinya hasil tersebut dapat memberikan gambaran terkait dampak yang terjadi terkait adanya pembangunan IKN yang berada di wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Mengingat didalam penelitian ini melihat pula dampak disekitar daerah penyanggah IKN seperti Penajam Paser Utara, Kutai Kartanegara, Balikpapan, dan Samarinda karena daerah tersebut menjadi titik utama dalam perjalanan pembangunan Ibu Kota Nusantara.

2.1 Kajian Teori

2.1.1 Analisis

Analisis ialah sebuah proses kegiatan yang dimana mencari atau nantinya menyusun, menguraikan suatu keseluruhan berlandaskan sistematis data yang dimana diperoleh pada saat hasil wawancara, dokumentasi, hasil uraian dilapangan, dan berbagai landasan yang nantinya dapat dijadikan bahan (Septiani, 2020). Menurut Salim dalam jurnal Onsu (2019) Analisis sendiri ialah penyelidikan suatu peristiwa (perlakuan, perbuatan, dll) untuk pada akhirnya bertujuan untuk memperoleh sebuah fakta tersendiri. Dengan mengelompokkan data, yang nantinya dijabarkan didalam bidang unit, melakukan proses penyusunan untuk nantinya dimasukan kedalam pola, proses memilah data yang dapat digunakan dan mana yang tidak digunakan, dan pada akhirnya menarik kesimpulan atau inti pembahasan bertujuan untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi bahan dan nantinya temuan tersebut dapat diinformasikan atau

diteruskan kepada orang lain Menurut sugiyono 2019 didalam jurnal Riani Elisabeth & Kusdian Novanti, (2023). Dari uraian diatas bisa dilihat bahwa proses analisis merupakan sebuah kegiatan didalamnya yang melakukan proses seperti pemilihan terhadap data, dan nantinya membedakan dari klaster data tersebut dapat digolongkan menurut indikator maupun kriteria yang mengikat nantinya dapat menyatukan satu kesatuan bahan secara utuh, atau dalam kata lain analisis merupakan proses mencari data, memilah data, menggolongkan data, menggabungkan data sampai proses menarik inti kesimpulan dari data yang diangkat. Sehingga nantinya data tersebut dapat dipahami dan dimengerti secara baik oleh pembaca baik diri sendiri maupun orang lain sebagai pembaca.

Menurut (Winarso 2021) memberikan pernyataan bahwa analisis ialah sebuah kegiatan berpikir yang dimana bertujuan untuk menguraikan berbagai keseluruhan menjadi satu kesatuan komponen, sehingga nantinya dapat mengetahui tanda-tanda yang komponen yang tersedia, hubungan satu sama lainnya agar mudah dimengerti menjadi satu kesatuan yang terpadu. Dalam proses menganalisis terdapat kegiatan menjelaskan, menguraikan, memberikan pembeda, menggabungkan, mengintegrasikan, memisahkan bahan, konsep yang dimunculkan atau permasalahan yang ada dimasukkan kedalam bagian terkecil nantinya dapat memberikan suatu gambaran kesimpulan dari inti bahan. Maka dari itu, kegiatan menganalisis juga memberikan sebuah kesimpulan dari adanya suatu permasalahan yang sedang diangkat nantinya dapat mudah dipahami dan dimengerti oleh pembaca.

2.2.2 Kutub Pertumbuhan

Pembangunan sendiri pada dasarnya adalah gambaran proses transformasi perubahan yang mengalami proses perubahan terus menerus yang dimana memiliki tujuan untuk menuju keadaan yang lebih baik (Wulandari & Tulis, 2022). Pembangunan sendiri merupakan sebuah gambaran usaha perubahan secara berkala atau terus menerus untuk nantinya menciptakan kesejahteraan tersendiri bagi masyarakat luas (Puspita, 2019). kutub pertumbuhan (*growth pole atau poledecroissance*). Teori ini pertama kali diungkapkan oleh pencetusnya atau

pemikirnya yaitu Francois Perroux, yang dimana seorang ahli ekonomi yang berasal dari Prancis. Mengikuti pendapat Perroux, Hirschman mengatakan bahwa untuk mencapai tingkat pendapatan yang lebih tinggi, terdapat keharusan untuk membangun sebuah atau beberapa buah pusat kekuatan ekonomi dalam wilayah suatu negara atau yang disebut sebagai pusat-pusat pertumbuhan (*growth point atau growth pole*). Pembangunan sendiri bertujuan untuk nantinya mencapai tujuan dalam rangka perbaikan pada lini aspek meliputi ekonomi, sosial, budaya hingga politik (Valentina & Elsera, 2023). Nantinya hasil dari pembangunan yang telah dijalankan, dapat dinikmati oleh masyarakat sebagai rasa wujud pengembangan dari sisi kesejahteraan konsep perubahan pada sisi sosial yang dimana berubah secara terus menerus kearah perkembangan dan kemajuan yang dimana memerlukan sebuah masukan-masukan yang menyeluruh dan berkesinambungan dimana merupakan usaha dari pemerintah dan masyarakat sendiri untuk nantinya mencapai tujuan negara sendiri. Maka dari itu, pembangunan sendiri bisa diartikan usaha yang memiliki perubahan yang nantinya untuk menuju keadaan yang lebih sempurna berlandaskan norma-norma yang ada, perencanaan, sisi pemberdayaan, potensi alam, manusia dan sosial budaya itulah yang disebut dengan pembangunan.

2.2.3 Ibu Kota Nusantara

Ibu Kota merupakan sebuah bagian perkotaan yang disusun dan dirancang nantinya sebagai inti pusat kekuasaan atau pusat pemerintahan pada suatu negara. Didalam perjalanannya Ibu Kota Negara Indonesia sendiri terletak di wilayah Daerah Khusus IbuKota atau DKI Jakarta yang dimana diatur didalam Undang-Undang No 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus IbuKota Jakarta Sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelah adanya Penetapan Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Republik Indonesia menjadikan wilayah tersebut memiliki keistimewaan tersendiri. Adanya penetapan tersebut menjadikan daerah DKI Jakarta semakin maju, pesat mulai dari pembangunan, pertumbuhan ekonomi namun seiringnya waktu pada masa era kepemimpinan Presiden Joko Widodo isu terkait pemindahan IbuKota terdengar namun isu

tersebut sudah ada sejak kepemimpinan Presiden pertama yaitu Presiden Soekarno yang ingin memindahkan Ibu Kota Negara ke wilayah Palangkaraya namun pemindahan tersebut gagal terjadi, kembali terdengar dan akan dipindahkan ke wilayah Jawa Barat pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono namun wacana tersebut gagal terlaksanakan dan pada masa era Presiden Joko Widodo Wacana pemindahan terjadi dan ditetapkan di Provinsi Kalimantan Timur tepatnya di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara yang menjadi daerah wilayah Otorita Ibu Kota Nusantara. Otorita Ibu Kota Nusantara sendiri diatur didalam UU no 3 tahun 2022 Ibu Kota Negara merupakan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ibu kota bernama Nusantara dan selanjutnya disebut Ibu Kota Nusantara adalah satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi yang wilayahnya menjadi tempat kedudukan Ibu Kota Negara sebagaimana ditetapkan dan diatur.

